

Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta)

The Effect Of Government Internal Control System Maturity On The Performance Of Government Agencies (Case Study At Purwakarta Regency Government)

Ageng Gumelar

Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

E-mail: ageng.gumelar.amp17@polban.ac.id

Iyeh Supriatna

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: iyeh.supriatna@polban.ac.id

Endah Dwi Kusumastuti

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: endah.dwik@polban.ac.id

Abstract: *This research was conducted to determine the effect of maturity of the government's internal control system on the performance of government agencies in the Purwakarta Regency Government. The population in this study is the Regional Work Unit (SKPD) in the Purwakarta Regency Government. The sample used in this study were 35 SKPDs in the Purwakarta Regency Government. The research method used is quantitative methods. The data source used is in the form of primary data. The data collection technique was carried out using research instruments in the form of questionnaires and interview guides. The data analysis method used is simple regression analysis. Result showed that the maturity of government internal control systems was positively and significantly affected by the performance of government agencies. With the increasing maturity of the government's internal control system, it can improve the performance of government agencies.*

Keywords: *Government Internal Control Systems Maturity, Performance of Government Agencies*

1. Pendahuluan

Pada era otonomi daerah saat ini, kinerja organisasi telah menjadi problema straregis bahkan menghasilkan publik isu di kalangan praktisi maupun akademisi. Menurut Putri (2013) pemerintah dalam hal ini sebagai organisasi sektor publik diharapkan dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat serta tanggap dengan lingkungannya yang diwujudkan dengan kinerja pemerintah dan mengupayakan pelayanan terbaik berkualitas, pembagian tugas yang jelas dan transparansi kepada masyarakat. Kinerja merupakan gambaran tentang taraf pencapaian pelaksanaan dalam kebijakan, program, kegiatan agar terwujudnya tujuan, sasaran, visi dan misi di suatu organisasi yang tercantum pada rencana strategis organisasi tersebut (Mahsun, 2006). Kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat, dan relatif rendah saat melaksanakan tugas dan fungsinya. Masalah ini terlihat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan tidak selesai sesuai dengan waktunya, tingkat pelayanan yang belum memadai atau relatif

rendah dan belum diselesaikan secara profesional. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pelaporan akuntabilitas kinerja dapat mewujudkan *good governance*. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimana hal tersebut merupakan letak akuntabilitas kinerja instansi di Indonesia diatur.

Pada tahun 2019 Kementerian PAN RB mengeluarkan hasil evaluasi terhadap LAKIP, Provinsi Jawa Barat mendapatkan predikat “A”, hal ini berarti implementasi dari SAKIP sangat memuaskan. Dari 27 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, tidak ada yang memperoleh predikat “A”. Predikat “BB” diperoleh oleh Kota Bandung, Kabupaten Bandung Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut, yang berarti berkinerja tinggi, sangat akuntabel, memimpin perubahan, dan memuaskan. Berdasarkan pada LAKIP Kabupaten Purwakarta tahun 2019, pada tahun 2019 pencapaian penilaian SAKIP Kabupaten Purwakarta meningkat dibandingkan pada tahun 2018 yang mendapatkan predikat skor 62,13, dan pada Tahun 2020, Kabupaten Purwakarta kembali mendapatkan predikat “B” dengan skor 65,50. Walaupun selalu mengalami peningkatan, ada beberapa hal yang masih menjadi catatan dari hasil evaluasi SAKIP tersebut, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, di antaranya komponen anggaran dan kegiatan belum mengacu dengan ketercapaian secara sempurna tujuan dan sasaran, kualitas analisis pemenuhan target capaian kinerja dalam laporan kinerja masih rendah yang menyebabkan informasi belum bisa diperoleh dengan rinci, belum dilakukan reviu terhadap program dan belum dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan daerah yang berfungsi mengkonfirmasi perencanaan perangkat daerah sudah berorientasi hasil (*outcome*). Selain itu, Bupati Purwakarta juga menyampaikan bahwa beberapa ASN Kabupaten Purwakarta masih ada yang menganggap bahwa SAKIP dijalankan hanya untuk kewajiban sebagai pemenuhan nilai perangkat daerah. Oleh karena itu, penilaian kinerja dapat dilakukan sebagai upaya dalam upaya meningkatkan nilai predikat SAKIP.

Dalam melakukan penilaian independen terhadap kinerja instansi pemerintah dapat didukung dengan kegiatan pengendalian dalam hal ini dilakukan melalui pengawasan intern (Yasmin, 2018). Pengendalian Intern dalam hal ini pada pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tingkat maturitas SPIP untuk tahun 2019 harus diposisi level 3 (terdefinisi) sesuai yang tertuang pada Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 buku II.

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKP Tahun 2019 menunjukkan bahwa maturitas SPIP di Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah berada pada kriteria tingkat “terdefinisi”, skor yang diperoleh sebesar 3,1200 . Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Purwakarta masih melakukan evaluasi atas pengendalian intern tanpa dokumentasi yang memadai, dan sudah melaksanakan praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Namun demikian, hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan pada LAKIP Inspektorat Purwakarta 2019 bahwa Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih belum optimal. Hal ini dapat ditinjau dari unsur pemantauan, dimana perhatian dari pimpinan suatu instansi dalam menindaklanjuti *output* pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang dan ditinjau dari unsur kegiatan pengendalian dimana pimpinan masih belum memanfaatkan dengan optimal hasil pemeriksaan dari obyek yang diperiksa, hal ini terlihat dengan adanya temuan-temuan yang selalu muncul dengan sifat yang sama dan berulang. Dan pada Tahun 2020 dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKP tahun 2020 maturitas SPIP di Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengalami penurunan dengan skor 3,0602. Padahal jika pelaksanaan SPIP sudah baik maka akan menciptakan kinerja yang efisien dan efektif.

Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengaruh maturitas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta ?". Dan untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

2. Kajian Pustaka

Menurut Institute of Internal Auditors (2013) maturitas merupakan suatu ukuran sistematis yang dapat mendeskripsikan dan menjelaskan komponen-komponen dari suatu proses yang dipastikan akan melaju ke arah yang lebih baik dari segi keluaran dan hasil. Konsep kematangan dalam suatu organisasi mempunyai tujuan untuk mengarahkan suatu organisasi pada tujuannya secara optimal (Andersen & Jessen, 2003). Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maturitas SPIP sendiri dapat menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu dengan tingkat lainnya.

Dalam organisasi pemerintahan, pengendalian intern diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Mengacu kepada peraturan itu, yang dimaksud Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses integral untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara rutin agar terciptanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kegiatan yang efektif dan efisien. Pengertian dari tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP menurut BPKP (2016) adalah tingkat kesempurnaan/kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mewujudkan tujuan pengendalian intern selaras dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Terdapat enam tingkatan maturitas penyelenggaraan SPIP, mulai dari urutan yang tertinggi sampai terendah yaitu optimum, terkelola dan terukur, terdefinisi, berkembang, rintisian, dan belum ada.

Variabel atau item untuk dipakai dalam menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan fokus penilaian tingkat maturitas SPIP. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 variabel tersebut terdiri dari 5 unsur dan 25 sub unsur yang menjadi fokus penilaian tingkat maturitas SPIP. Mangkunegara (2016) mengutarakan bahwa kinerja merupakan pencapaian kerja seseorang dilihat dari kuantitas dan kualitas dalam menjalankan tugas sejalan dengan tanggungjawab seseorang tersebut. Menurut Pasolong (2013) kinerja merupakan hasil kerja diraih oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pegawai dan mengacu pada aturan hukum, etika dan moral.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja adalah landasan ketika mengaplikasikan manajemen kinerja agar akuntabilitas dan pelayanan publik dapat meningkat melalui penjelasan hasil dan keluaran yang seharusnya diraih untuk mencapai organisasi yang akuntabel.

Menurut LAN dan BPKP (2000), pengukuran indikator kinerja instansi pemerintah terdiri dari 4 komponen, di antaranya:

1. Perencanaan dan penetapan tujuan.
2. Pengembangan ukuran yang relevan.
3. Pelaporan formal atas hasil.
4. Penggunaan informasi.

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sejenis di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Asep (2009) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, penelitian Trianda Nurbaeti (2019) dengan judul Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Garut), dan penelitian oleh Tasha Widya Sucitra (2020) dengan judul Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dan Implikasinya pada Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Garut).

Adapun hipotesis penelitian yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

H1: Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

3. Metode Penelitian

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu variabel Maturitas SPIP sebagai variabel independen dan variabel Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel dependen. Populasi pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 SKPD dengan 70 responden pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sumber data yang dipakai adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan memakai instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara serta melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji instrumen penelitian. Metode analisis data yang dipakai yaitu analisis regresi sederhana yang dimana sebelum analisis regresi sederhana dilakukan, uji asumsi klasik (uji linearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas) dipakai untuk mengetahui apakah data penelitian telah terpenuhi syaratnya untuk dilakukan analisis regresi sederhana atau tidak.

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis regresi sederhana. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh variabel Maturitas SPIP (X) terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dengan persamaan regresi linier yang telah dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Kinerja Instansi Pemerintah

X = Variabel Maturitas SPIP

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari uji validitas pada variabel Maturitas SPIP dan variabel Kinerja Instansi Pemerintah menggunakan *software SPSS statistics* versi 26 dituangkan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1 Uji Validitas

Indikator	Item	R Hitung	R Tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	X1	0.399	0,235	0.001	Valid
	X2	0.491	0,235	0.000	Valid
	X3	0.430	0,235	0.000	Valid
	X4	0.484	0,235	0.000	Valid
	X5	0.430	0,235	0.000	Valid
	X6	0.501	0,235	0.000	Valid
	X7	0.582	0,235	0.000	Valid
	X8	0.597	0,235	0.000	Valid
	X9	0.446	0,235	0.000	Valid
	X10	0.505	0,235	0.000	Valid
	X11	0.486	0,235	0.000	Valid
	X12	0.463	0,235	0.000	Valid
	X13	0.442	0,235	0.000	Valid
	X14	0.629	0,235	0.000	Valid
	X15	0.486	0,235	0.000	Valid
	X16	0.611	0,235	0.000	Valid
	X17	0.530	0,235	0.000	Valid
	X18	0.524	0,235	0.000	Valid
	X19	0.527	0,235	0.000	Valid
	X20	0.542	0,235	0.000	Valid
	X21	0.489	0,235	0.000	Valid
	X22	0.598	0,235	0.000	Valid
	X23	0.450	0,235	0.000	Valid
	X24	0.544	0,235	0.000	Valid
	X25	0.545	0,235	0.000	Valid
Kinerja Insstansi Pemerintah	Y1	0.581	0,235	0.000	Valid
	Y2	0.416	0,235	0.000	Valid
	Y3	0.569	0,235	0.000	Valid
	Y4	0.501	0,235	0.000	Valid
	Y5	0.709	0,235	0.000	Valid
	Y6	0.555	0,235	0.000	Valid
	Y7	0.448	0,235	0.000	Valid
	Y8	0.666	0,235	0.000	Valid
	Y9	0.611	0,235	0.000	Valid
	Y10	0.585	0,235	0.000	Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat semua variabel valid setelah dilakukan pengujian pada setiap item. Seluruh variabel mempunyai nilai $0,000 < 0,05$ dilihat dari nilai signifikan, dan jika dilihat dari perbandingan r_{hitung} (nilai *pearson correlation*) dengan r_{tabel} untuk $N=70$ di signifikansi 5% sebesar 0,235 maka disimpulkan semua item pertanyaan yang ada pada variabel Maturitas SPIP, dan variabel Kinerja Instansi Pemerintah adalah valid.

Kemudian dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran pada variabel Maturitas SPIP dan variabel Kinerja Instansi Pemerintah menggunakan *software SPSS statistics* versi 26 dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 2 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items	Keterangan
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X)	0,881	25	Reliabel
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,764	10	Reliabel

Hasil dari uji reliabilitas pada tabel tersebut, terdapat koefisien *Cronbach's Alpha* terhadap butir yang valid pada variabel Maturitas SPIP sebesar $0,881 > 0,6$ dan variabel Kinerja Instansi Pemerintah sebesar $0,764 > 0,6$. Dapat disimpulkan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sudah *reliable*.

4.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik perlu dilakukan guna memenuhi persyaratan sebelum melakukan analisis regresi sederhana. Uji asumsi klasik yang dipakai pada penelitian ini di antaranya uji linearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas

4.2.1 Hasil Uji Linearitas

Secara umum uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan yang linear secara signifikan atau tidak pada variabel dependen dan independen. *Software SPSS statistics* versi 26 dipakai dalam melakukan uji linearitas dalam penelitian ini. Hasil output uji linearitas variabel independen Maturitas SPIP terhadap variabel dependen kinerja instansi pemerintah disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 3 Hasil Uji Linearitas

ANOVA Tabel							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kinerja Instansi * Maturitas SPIP	Between	(Combined)	364.829	21	16.583	4.492	.000
	n	Linearity	307.907	1	307.907	83.403	.000
	Group	Deviation from Linearity	56.922	21	2.711	.734	.777
	s						
Within Groups			173.514	47	3.692		
Total			538.343	69			

Diperoleh nilai *Deviation from Linearity Sig.* adalah 0,777 lebih besar daripada 0,05 jika dilihat dari nilai signifikansi (Sig) dari output SPSS di atas, dan untuk nilai F_{hitung} 0,734 lebih kecil dari

nilai F_{tabel} 1,785. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan linier antara variabel Maturitas SPIP terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dalam menguji apakah model statistik variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov*. *Software SPSS statistics* versi 26 digunakan untuk memperoleh hasil dari pengujian normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.82747241
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.041
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* > (sig.) 0,05 berarti data terdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* < (sig.) 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* di atas, terdapat nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* yaitu sebesar 0,200. Nilai *Kolmogorov-Smirnov* tersebut besar nilainya dibandingkan dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,05. Dari hal tersebut disimpulkan bahwa sebaran data berdistribusi normal pada penelitian ini.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah dalam model terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain maka dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji Glejser digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Uji Glejser dilakukan dengan cara menghasilkan regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil output dari uji Glejser menggunakan *software SPSS statistics* versi 26 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5 Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-2.145	2.108		-1.017	.313
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.034	.020	.202	1.697	.094

a. Dependent Variable :Abs_RES

Variabel independen Maturitas SPIP memiliki nilai sig. 0,094 > 0,05. Artinya tidak ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen Abs_RES secara signifikan. Oleh karena itu disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.3 Analisis Regresi Sederhana dan Uji Hipotesis

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Maturitas SPIP (X) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dapat menggunakan analisis regresi sederhana. *Software SPSS Statistics* versi 26 digunakan untuk memperoleh hasil pengujian regresi sederhana yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 6 Analisis Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.561	3.476		2.463	.016
	Maturitas SPIP	.316	.033	.756	9.532	.000

Kemudian persamaan regresi didapat dari tabel di atas sebagai berikut:

$$Y = 8,561 + 0,316 X + e$$

Serta adapun penjelasan dari persamaan regresi di atas sebagai berikut:

1. Konstanta = 8,561

Jika variabel Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diasumsikan sama dengan 0 (nol), maka variabel Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 8,561.

2. Angka koefisien regresi = (+) 0,316

Jika variabel Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) poin, maka akan menimbulkan kenaikan variabel Instansi Pemerintah sebesar 0,316. Karena nilai koefisien regresi bertanda positif (+), maka dapat dikatakan bahwa variabel Maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

3. e = faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen/nilai residu

Setelah dilakukan analisis regresi sederhana kemudian dilakukan pengujian hipotesis menggunakan metode uji statistik t atau biasa disebut uji signifikan individual.

Adapun yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada analisis regresi dengan

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) dari hasil SPSS adalah :

- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikansi $< 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya bahwa variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.
- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau signifikasnsi $> 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan dari kriteria di atas dan setelah dilakukan pengujian menggunakan *software* SPSS *statistics* versi 26, maka dapat diketahui dari persamaan regresi di atas diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif (+), artinya dapat diketahui bahwa variabel Maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dan hasil pengujian pada variabel Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X) diperoleh nilai $t_{hitung} = 9,532 > t_{tabel} 1,997$ dan $sig. = 0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya koefisien regresi signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Maturitas SPIP (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Semakin tinggi Maturitas SPIP maka kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat. Maka dari itu, hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa Maturitas SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah terbukti dan dapat diterima.

4.4 Koefisien Determinasi

Persentase pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen merupakan nilai koefisien determinasi (R^2). Untuk mengetahui berapa persen pengaruh variabel Maturitas SPIP terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah, dapat dilihat dari tabel output hasil *Software* SPSS *Statistics* versi 26 berikut:

Tabel. 7 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756 ^a	.572	.566	1.84086

a. Predictors: (Constant), Maturitas SPIP

Dari tabel di atas diperoleh nilai $R^2 = 0,572 = 57,2\%$ artinya variabel independen Maturitas SPIP mempengaruhi variabel dependen Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 57,2 % dan sisanya sebesar 42,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Maturitas SPIP (X) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel ringkasan hasil pengujian di bawah ini:

Tabel. 8 Ringkasan Hasil Pengujian

Kode	Hipotesis	Hasil
H_1	Maturitas SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Diterima

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini pada variabel Maturitas SPIP terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, didapatkan nilai koefisien regresi bertanda positif (+) sebesar 0,316, maka dapat disimpulkan variabel Maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian diperoleh nilai t hitung $9,532 > t$ tabel $1,997$ dengan nilai Sig. $0,000 < 0,05$ yang berarti signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak.

Besarnya pengaruh maturitas SPIP terhadap kinerja instansi pemerintah di pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebesar 57,2 % dan sisanya sebesar 42,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Pengaruh tersebut disebabkan oleh Maturitas SPIP melalui 5 (lima) unsur SPIP yang di antaranya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern yang merupakan faktor yang dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Semakin meningkatnya maturitas SPIP pada pemerintah Kabupaten Purwakarta maka kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat

5. Kesimpulan

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa variabel Maturitas SPIP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah pada pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal ini didukung dengan hasil observasi peneliti pada Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat maturitas SPIP yang diperoleh pemerintahan di suatu daerah dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah tersebut dalam hal ini pada pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Daftar Pustaka

- Andersen, E. S., & Jessen, S. A. (2003). *Project maturity in organisations*. *International Journal of Project Management*, 21(6), 457–461.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- LAN dan BPKP. (2000). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaga administrasi Negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019: Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019: BPKP
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020: BPKP
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama. Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mangkunegara, A. A. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rosda.
- Nurbaeti, T., & Nugraha, D. S. (2019). Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Garut). Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2016. (n.d.).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Putri, G. Y. (2013). *Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD*. Jurnal Akuntansi.
- Rose, J. (2013). Selecting, Using, and Creating Maturity Models: A Tool for Assurance and Consulting Engagements. July, 1–27. https://www.iaa.org.uk/media/358857/selecting_using_and_creating_maturity_models_-_a_tool_for_assurance_and_consulting_engagements.pdf
- Sucitra, T. W., & Supriatna, I. (2020). *Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dan Implikasinya pada Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Garut)*. 26–27.